

PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK PADA GRUP FACEBOOK GEBRAK NGADA: PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TENTANG BPJS GRATIS

Bertholomeus Jawa Bhaga¹, Yeremias Bardi², Velmi Maya Putri³
^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Maumere, Sikka NTT
 berthojawa14@gmail.com

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<p>Keywords Public Opinion, Gebrak Ngada Facebook Group, Free BPJS</p> <p>Kata kunci Opini Publik, Grup Facebook Gebrak Ngada, BPJS Gratis</p>	<p><i>Massive dissemination of information about the programs of regent and deputy regent candidates in post-conflict regional election succession often shapes public opinion. In order to attract sympathy and increase electability in the post-conflict regional election constellation, regional head candidates use success teams to spread news and narratives about pro-people programs both in the mass media and on various social media platforms such as Facebook groups. The aim of this research is to describe the formation of public opinion in the Facebook group Gebrak Ngada: Free BPJS Program for residents of Ngada Regency in East Nusa Tenggara. This approach tries to describe in detail the topic being studied. The results of the research show that the process of forming opinions in the Gebrak Ngada Facebook group is related to the Free BPJS Program for residents of Ngada Regency in East Nusa Tenggara. The initial assumption is that the formation process begins with forming opinions related to four factors, namely experience, cultural background, and espoused values. , and news that develops so that opinions are formed, and opinions will be formed after a consensus is formed. The most important thing is that opinions must gain public trust (belief) and show and convey those who have benefited from this program. In connection with consensus, every incident is exposed by social media, with a long period of coverage (broad public) and also featuring figures who are considered to represent certain groups.</i></p> <p><i>Penyebaran informasi yang masif tentang program calon bupati dan wakil bupati dalam suksesi pemilukada seringkali membentuk opini publik. Demi menarik simpati dan menaikkan elektabilitas dalam konstelasi pemilukada, calon kepala daerah menggunakan tim sukses untuk menyebarkan berita-berita dan narasi-narasi tentang program-program prorakyat baik di media massa maupun di berbagai platform media sosial seperti grup facebook. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pembentukan opini publik pada grup facebook Gebrak Ngada: Program BPJS Gratis bagi warga masyarakat Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur. Pendekatan ini mencoba mendeskripsikan secara detail dari topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan opini pada grup facebook Gebrak Ngada berkaitan dengan Program BPJS Gratis bagi warga masyarakat Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur menunjukkan Asumsi awal yaitu proses pembentukan diawali dengan pembentukan opini berkaitan dengan empat faktor yaitu pengalaman, latar belakang budaya, nilai yang dianut, dan berita yang berkembang sehingga terbentuk opini, serta akan terbentuk opini setelah terbentuk konsensus. Yang terpenting opini harus mendapatkan kepercayaan dari publik (belief) dan menampilkan dan menyampaikan pihak yang telah mendapat manfaat program ini. Berkaitan dengan konsensus, setiap kejadian diekspos oleh media sosial, dengan waktu yang lama kemudian cakupan (luasnya publik) dan menghadirkan juga tokoh yang dianggap mewakili kelompok tertentu.</i></p>

Pendahuluan

Media sosial adalah salah satu platform yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti berkomunikasi, bersosialisasi, berbagi informasi, dan hiburan. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern saat



ini. Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi dan mendapatkan informasi. Tentunya dengan adanya media sosial memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan kita.

Media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling populer di dunia. Menurut data dari *We Are Social* pada tahun 2023, terdapat 4,88 miliar pengguna media sosial di dunia. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di tahun – tahun selanjutnya. Peningkatan jumlah penggunaan media sosial ini tentunya telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap opini publik. Media sosial telah menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses informasi, bertukar pendapat, dan membentuk opini.

Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini publik dikarenakan media sosial memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya efektif dalam membentuk opini publik misalnya Media sosial dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Hal ini membuat informasi yang disebarluaskan melalui media sosial dapat menjangkau khalayak yang luas. Selain itu media sosial memungkinkan terjadinya interaksi antara pengguna. Hal ini membuat pengguna untuk saling bertukar informasi dan pendapat, sehingga dapat membentuk opini publik yang lebih beragam dan cepat tersebar luas. Media sosial memiliki juga kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat, sehingga membentuk pengetahuan-pengetahuan baru. Sebuah penelitian di Indiana University melakukan penelitian dengan membandingkan penggunaan media sosial dalam partisipasi politik pada lima tahun negara-negara di Asia (Indonesia, Taiwan, Cina, Thailand, dan Jepang). Hasil temuan dari penelitian tersebut menemukan bahwa Indonesia adalah negara dengan pangsa tertinggi pengguna jejaring sosial yang menggunakan media sosial untuk mendapatkan berita (71,6 %). Proporsinya ini lebih tinggi daripada di Cina yang menempati peringkat kedua (68,3 %), Jepang (64,4 %), Thailand (61,2 %), dan Taiwan (55,7 %) (Ambardi et al, 2014). Pengguna media sosial dalam keterlibatannya terkait isu-isu politik bukan semata-mata untuk menghidupkan partisipasi politik

mereka, akan tetapi lebih cenderung untuk mengejar partisipasi dalam demokrasi. Walaupun demikian, terlepas dari motif apa yang diinginkan masyarakat dalam penggunaan media sosial sebagai bentuk partisipasi demokrasi, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial telah memberikan dampak pembentukan opini publik yang akan mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman politik mengenai suatu masalah politik (Morissan, 2014).

Menurut Dan Nimmo (1989:23-25) opini publik terbentuk melalui empat tahapan pembentukan, yakni 1) adanya konflik yang berpotensi menjadi isu, 2) kepemimpinan politik, 3) interpretasi personal dan pertimbangan sosial serta 4) publikasi opini pribadi. Seperti yang disebutkan di atas, isu merupakan tahap awal munculnya opini publik. Permasalahan, pertikaian atau pun perselisihan yang terpublikasikan berpotensi menjadi isu dan dapat berujung pada kemunculan opini publik ketika isu tersebut menjadi isu umum dan sifatnya kontroversi.

Leonard W. Doob memaparkan bahwa opini publik sebagai sikap individu-individu yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang sama mengenai sebuah persoalan tertentu. (Djoenaesih S. Sunarjo, 1984, 26). Pendapat lain dikemukakan oleh William Albiq yang dikutip oleh Sastropoetro, opini publik merupakan suatu jumlah dari individu-individu yang diperoleh melalui perdebatan dan opini publik merupakan hasil interaksi antar individu dalam suatu publik. (Helena Olii, 2007). Sedangkan Walter Lippmann secara spesifik menggambarkan opini publik sebagai Opini Umum dengan huruf besar yaitu gambar-gambar yang digerakkan oleh sekelompok orang atau oleh pribadi yang bertindak atas nama kelompok. Di mana gambaran-gambaran dunia di luar diri kita itu berhubungan dengan tingkah laku sesama, sejauh tingkah laku mereka itu menyangkut diri kita, tergantung pada kita, atau menarik perhatian kita, disebut sebagai urusan masyarakat umum. (Walter Lippmann, 1998, 26).

Metode Penelitian

Merujuk pada permasalahan di atas, maka penelitian perlu menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara



sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, (Syaifudin Azwar 2002),5-6). Pendekatan ini merupakan suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang pembentukan opini publik pada grup facebook Gebrak Ngada: Program BPJS Gratis bagi warga masyarakat Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. (Lexy J.Moleong 2002, 4). Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian pada hakikatnya merupakan proses mengolah data yang telah diperoleh di lapangan agar menjadi informasi. Hasil akhir dalam penelitian disamping tergantung kepada data yang diperoleh di lapangan juga akan sangat tergantung pada bagaimana menganalisis data (Suliyanto, 2018:169). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif melalui penelitian kualitatif yaitu reduksi data penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur sedang dalam persiapan melaksanakan pemilukada seperti pada daerah lainnya di Indonesia. Dalam proses dan dinamika perpolitikannya, tidak terlepas dari janji-janji para bakal calon kepala daerah yang ingin menang dalam proses politik tersebut. Hal yang menarik untuk dikaji adalah adanya program salah satu paket calon kepala daerah yang akan menerapkan BPJS gratis. Program ini ramai diperdebatkan di media sosial baik perorangan maupun di grup. Salah satu grup facebook dengan jumlah anggota besar di Ngada bernama Gebrak Ngada. Pembahasan mengenai program BPJS Gratis awal mula dipost oleh seseorang yang bukan merupakan pendukung calon tersebut pada tanggal 11 September 2024 lalu mendapatkan beragam komentar menarik lainnya dan jika ditarik kesimpulan sementara menuai dua respon yang berbeda yakni

menerima dan menolak. Hal demikian dapat dikatakan bahwa program ini telah membentuk opini publik di ruang publik Ngada. Pembentukan opini publik dilakukan oleh media sosial dengan beberapa tahap:

1. Persepsi

Persepsi adalah suatu proses memberikan makna, pengalaman dan pengetahuan awal yang dimiliki masyarakat beragam sesuai dengan yang penulis temukan dilapangan tanggapan dari masyarakat:

“BPJS su tolak baru kita bicara tentang kesehatan dan pengobatan gratis, ini benar benar di luar logika saya”

Status di atas mendapatkan komentar sebagai gambaran persepsi yang lain yakni:

“Kalo hanya dengar dari telinga ke telinga dan tidak tau alasannya tidak usah omong...”

Mereka punya kebijakan dan wewenang sesuai aturan dan pedoman yang berlaku...

Kalo mau tau persoalannya harus bisa mendengarkan alasan dari pihak-pihak lain spy anda bisa simpulkan...

Jangan asal tabur “

Sebagai responnya, pemilik postingan awal membalas:

“Saya tau apa yg saya posting bos tdk prlu di baca lagi, satu kata dari saya yaitu klarifikasi ttng bpjs yg di tolak,, ini kan aneh suda di tolak baru kita bicara ttng kesehatan lalu bagaimana dgn msyrket yg pendapatan rendah,, itu saja”

Beberapa komentar yang lain masih berisikan persepsi tentang keragu-raguan atau sikap skeptis atas program yang ditawarkan. Namun, terdapat beberapa komentar dari paket calon bupati yang telah menggagas program BPJS Gratis ini yakni seperti di bawah ini :

“BPJS tidak ditolak hanya tunda pembahasan pada APBD perubahan dan didoroh untuk dimuat pada APBD induk 2025....dan MoU pembahasan BPJS di APBD induk 2025 sudah ditandai tangani oleh bupati Ngada dan ketua DPRD...dan jika AP menyampaikan bahwa DPRD menolak BPJS maka itu adalah boaks”

Namun juga masih ada komentar lain yang berusaha untuk melawan dan menunjukkan persepsi yang berbeda dari masyarakat dunia maya yakni :

“ Kalau namanya su tolak BPJS berarti tdk syang masyarakat... Buat apa kita pilih lagi... Ganti saja eeee mae pusing masih ada yng hatinya murni “

Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Grup FB yang sama dan ditemukan ternyata pada momen-momen terdahulu sudah ada pembahasan dengan topik yang sama, BPJS sempat diusulkan oleh calon petahan namun ditolak oleh anggota DPRD yang kemudian hari menjadi calon wakil bupati yang mengusulkan BPJS gratis dimaksud sebagai salah satu program pakatnya. Hal tersebut terlihat dalam kutipan status facebook Gebrak Ngada pada tanggal 4 Oktober 2024 oleh akun atas nama Pruntum Kuntus Kukululus seperti di bawah ini :

“ Program BPJS gratis sudah didepan mata,kamu tolak.. Sekarang baru janji lagi BPJS gratis. Jeritan masyarakat dijadikan mainan “

Dan diperkuat dengan berita pada media massa yakni :



Dari beberapa kutipan komentar dan gambar di atas di atas maka bisa dipahami, seseorang akan mempunyai persepsi. antara lain disebabkan oleh kenyataan yang ditemuinya dari berbagai status yang diposting pada grup facebook secara serentak, dan secara bertahap baik itu melalui media sosial ataupun

penyebaran melalui media konvensional yang ada seperti cuplikan berita-berita dari media online.

2. Opini

Opini sendiri mempunyai kaitan yang erat dengan pendirian, ketika membaca dan mencermati berbagai komentar dan kritikan ditemukan hal-hal yang berkaitan mengenai kepercayaan dan keyakinan yang mereka anut, mengenai program BPJS Gratis di kalangan masyarakat Ngada. Hal tersebut terlihat dari beberapa komentar di bawah ini :

Dari persepsi yang nampak pada beberapa kutipan di atas, muncul beberapa ragam komentar yang menunjukkan opini yang berbeda. Hal tersebut seperti terlihat di bawah ini :

Riski Wolo

Dia sendiri yg tolak dan sekarang dia lagi yg memperjuangkan.

Ini yg namanya melawan pernyataan diri sendiri..

Mantan ketua dprd ngada vs calon wakil bupati ngada

Abdurahman

Demi ambisi setan mau dpt yg enak harus jual obat palsu dan janji2 palsu juga shgg masyarakat jadi kelinci percobaan

Arys Loko

Semuanya Shu pernah duduk memimpin Ngada n semua masyarakat tentu sdh pada tahu....ahhhhhh entah sapa yg terpilih kelak dialah pemimpin Ngada kita

Purnama Berani

Data mana,,utang bpjs sd lunas blm,,jgn sampe masarakat hx pegang kartu bpjs giliran berobat ke faskes,ketika petugas klik no nik di tolak karena masih ada utang sm bpjs,,jgn paksa mesin di akir jabatan jgn jg kejar jam tayang eceeee,,salam waras murni dia one ate

Poly Nau

Yg di tolak Bpjsx...karna masa aktifx tinggal 3 bln le,, kalau pun pemerintah Mau paksa Menerima yg jlsnya sangat Rugi...anggaran 2 M,, belum tentu Mencapai target dgn Masyarakat yg sakit,, walaupun Masyarakat



yg sakit Bisa mencakupi 15 Ribu,, masih syukur,, kalau tdk sampai yg jelasx kita yg Rugi Pemda byr ke pihak Bpjs...

Caitlyn Rimo

Bentuk pembodohan publik yg paling menonjol adalah KARTU KIS GRATIS ini,,Makanya hati2 dgn Calon pemimpin yg inkonsisten,yg tidak pegang akan janji2 nya,,kemarin menolak KIS gratis yg diusulkan oleh pemerintah,,hari ini mendadak menyetujui KIS gratis,,setelah terpilih nanti robah lagi,,hapus itu KIS gratis,,prinsip daerah ini kita yg stell.keduanya perpaduan yg pas,,yg satunya membangun narasi dan memposisikan diri seolah2 dia dizolimi oleh AP,,yg calon wakilnya inkonsisten janjinya suka berubah2.ketika di kritik nanti alasan bilang ini sudah melalui kajian yg mendalam

Yoan Lobobutu (2 Oktober 2024)

PENYANDERAAN BPJS DI NGADA; KEJAHATAN POLITIK YANG KEJI BPJS MENJADI ISU PRIMER DAN PRINSIPIL YANG PEMENUHANNYA HARUS DIUTAMAKAN DAN TIDAK BOLEH DITUNDA. NAMUN DI NGADA, LEMBAGA YANG MEWAKILI KEPENTINGAN RAKYAT JSTRU TELAH MENOLAK MENTAH MENTAH. ALASAN PENOLAKAN SEDERHANA SEKALI; "MENUNGGU DATA YANG AKURAT" SEBENARNYA, APA SULITNYA MENDAPATKAN DATA DALAM TATA BIROKRASI YANG APIK SAAT INI? ALASAN DI ATAS HANYALAH KAMUFLASE DAN PEMBOHONGAN PUBLIK. AKAL BULUSNYA BEGINI...

BPJS HARUS DITAHAN DULU, JANGAN DULU DIBICARAKAN, APALAGI DIEKSEKUSI OLEH BUPATI YANG SEDANG BERKUASA SEKARANG. JIKA TERLANJUR DIEKSEKUSI SEKARANG, SI HOMO FLORESISNSIS DARI LIANGBUA ITU TIDAK PUNYA BAHAN KAMPANYE DAN TIDAK BISA MEMBERI JANJI PENGobatan GRATIS LAGI MELALUI SKEMA BPJS ITU. INI ALASAN YANG SEBENARNYA.

MARI KITA REFLEKSIKAN! KETIKA RAKYAT KECIL SANGAT MEMBUTUHKAN

BPJS UNTUK MEMBELA KEHIDUPANNYA, ADA CALON PEMIMPIN YANG MENYANDERA PROGRAM INI HANYA SUPAYA MEMILIKI ISU YANG INGIN DIJUAL UNTUK MENAIKAN POPULARITASNYA. INI SEBUAH KEJAHATAN POLITIK YANG SANGAT KEJI! COBA BAYANGKAN! DALAM KURUN WAKTU SAMPAI PENETAPAN DAN EKSEKUSINYA ADA BANYAK NYAWA MANUSIA YANG TERPAKSA TIDAK DISELAMATKAN KARENA BPJS SENGAJA DITAHAN HANYA UNTUK PENCITRAAN SEORANG MANUSIA YANG BELUM TENTU BISA MEMBAWA NGADA LEBIH BAIK. BENAR KATA KAMU "NGADA TIDAK BAIK-BAIK SAJA" KARENA NGADA SEDANG DISANDERA OLEH PENJAHAT PENJAHAT POLITIK. RAKYAT NGADA MASIH MAU MENDUKUNG PENJAHAT PENJAHAT INI? ORANG YANG MENDAPATKAN KEKUASAAN DENGAN KEJAHATAN, DIA AKAN MERASA LUMRAH DENGAN SEGALA BENTUK KEJAHATAN DALAM BERKUASA. BERPIKIRLAH!

Dari apa yang disampaikan oleh narasumber dan observasi yang penulis lakukan, dapat dipahami bahwa dalam opini ini harus mendapatkan kepercayaan dari publik (*Belief*) dan menampilkan dan menyampaikan orang yang telah mendapat manfaat dari program ini atau semacam simulasi.

3. Konsensus

Opini individu bisa berkembang menjadi luas, menjadi milik suatu segmen masyarakat. Opini yang terkristal menjadi luas itu disebut opini publik. Untuk berkembang menjadi opini publik, opini-opini tersebut melewati sejumlah dimensi, yakni,

Berkaitan dengan waktu penyebaran informasi salah seorang narasumber menyampaikan:

Hanzth Bhd (11 September 2024)

BPJS su tolak baru kita bicara tentang kesehatan dan pengobatan gratis,ini benar benar di luar logika sayaa



Remmy Sola (11 Oktober 2024)

1. Minta data masyarakat yg akan memperoleh BPJS, by name by address. Pemerintah tdk mampu memenuhi permintaan DPRD. Sedangkan yg hadir pada saat Sidang Perubahan APBD adalah Pak Wakil Bupati (Pak Ray Bena). Bisa saja rekomendasi hasil sidang tersebut tdk disampaikan kepada Bupati.
2. Kalian mengatakan bhw apabila dana yg dialokasikan utk BPJS tdk terpakai oleh peserta BPJS, maka dana tersebut akan hangus. Lucunya, apabila MURNI menang, maka masyarakat akan memperoleh BPJS. KESEHATAN GRATIS MELALUI BPJS, MURNI SOLUSINYA 🍌🍌🍌🍌🍌🍌. LOGIKA TIPU LPU

Ate Bhai Bila (20 Oktober 2024)

Mau bangun RS saja kita masih harus Utang dulu tapi ini malah tawarkan BPJS Gratis

Komentarnya adalah :

Dari pernyataan ini jelas bahwa waktu pendistribusian informasi mengenai BPJS gratis ini sudah lama dilakukan, dalam wawancara juga beliau menyebutkan bahwa cakupan berita ini juga sangat luas, tidak hanya penduduk kota yang membaca ini, mengingat pemberitaan yang bersifat elektronik. Yang bisa menjangkau semua daerah.

Untuk menguatkan pernyataan narasumber di atas seorang warga menyampaikan:

“Sepertinya saat awal-awal munculnya program ini diekspos oleh media massa. Dan menghadirkan berbagai informasi tapi masih berkaitan dengan BPJS gratis, misalnya dari tokoh agama dan ekonomi” (wawancara ,21 Oktober 2024).

Dari beberapa wawancara diatas dan observasi penulis dilapangan berkaitan dengan konsensus. Dapat dipahami bahwa informasi ini berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan kemudian cakupan (luasnya publik) yang dijangkau media tersebut, dan menghadirkan juga Tokoh, Hampir dalam setiap kasus selalu tampil seorang tokoh.

Ketika arus informasi dan komunikasi berlangsung satu arah (*one way communication*). Tidak sebatas itu saja, bahkan boleh disebut cenderung satu pintu saja dengan demikian ada kesempatan bagi

masyarakat untuk membentuk persepsi dan menentukan bagaimana masyarakat akan bersikap menanggapi satu isue tertentu.

Persepsi masyarakat tidak serta merta terbentuk dalam benak mereka bisa dikarenakan efek langsung dari media, namun juga yang lebih mencerna berita terlebih dahulu untuk mendapatkan fakta. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berkomunikasi dengan orang lain tentang pemberitaan di media massa, dengan kata lain masyarakat tidak dengan begitu mudahnya terpengaruh dengan apa yang tersaji di media.

Dari poin opini dapat dipahami bahwa dalam opini ini harus mendapatkan kepercayaan dari publik (*Belief*) dan menampilkan dan menyampaikan orang yang telah mendapat manfaat dari program ini atau semacam simulasi. Opini diungkapkan dalam suatu interaksi sosialnya. Saking senangnya media massa atas sosok pemimpin tertentu dan keberpihakan yang sangat kentara membuat pemberitaan media massa irasional dan tidak lagi mendidik masyarakat dalam mengkritisi hal-hal yang sepatutnya perlu dilakukan. Memang tokoh-tokoh yang diliput dan kerap diberitakan oleh media massa akan menjadi populer dan tampak sekali tokoh-tokoh itu juga “menikmati peliputan tentang dirinya. Dapat dipahami berkaitan dengan konsensus bahwa informasi ini berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan sangat tergantung pada unsur emosi anggota segmen masyarakat, kesamaan persepsi, kepercayaan atas isu yang dibicarakan, pengalaman yang sama, tekanan-tekanan dari luar, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sumber berita. Media massa Konsensus biasanya akan berkembang lebih pesat lagi apabila suatu kejadian diekspos oleh media massa. Bahkan, media massa sering disebut sebagai alat pembentukan opini publik selanjutnya selalu menampilkan seorang tokoh. Konsensus yang muncul biasanya amat tergantung pada tokoh yang menangani kasus tersebut. Berbagai kebijakan yang diatur oleh pemerintah sudah selayaknya diinformasikan pada publik secara luas. Dengan begitu, hak publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dapat dipenuhi dengan baik. Selain menginformasikan, media juga menjadi perantara bagi pemerintah untuk meyakinkan masyarakat atas setiap kebijakan yang



dibuatnya. Sehingga hal ini dapat mendukung pelaksanaan rencana program yang akan diterapkan.

Kesimpulan

Pengetahuan masyarakat tentang samisake, selain didapat dari media massa juga didapat dari pengalaman mereka dengan orang-orang disekitar yang bertukar pengalaman satu sama lain dan terpenting, maka akan terbentuk persepsi terhadap program samisake, opini harus mendapatkan kepercayaan dari publik (*Belief*) dan menampilkan dan menyampaikan orang yang telah mendapat manfaat dari program ini atau semacam simulasi. Berkaitan dengan konsensus. berkembang lebih pesat apabila suatu kejadian diekspos oleh media massa, berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan kemudian Cakupan (luasnya publik) yang dijangkau media tersebut, dan menghadirkan juga tokoh yang dianggap merefleksikan dari kelompok mereka.

Daftar Pustaka

- Ambardi. K., Parahita. G., Lindawati. L., Sukarno. A., Aprilla. N., (2014). Mapping Digital Media:Indonesia, A REPORT BY THE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS : OpenSocietyFoundations
- Dan Nimmo. (2001). Komunikasi Politik; khalayak dan efek. Bandung, Rosdakarya.
- Doob, Leonard W, 1948, Public Opinion and Propaganda, Henry Holt and Company, New York
- Djoenaesih S. Sunarjo. (1984). Opini Publik. Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- Effendy, Onong Uchjana.(2002). Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Firsan Nova. (2009) Crisis Public Realities .Jakarta,
- Haris Sumadira.(2016).Hukum dan Etika Media Massa ,Bandung: Simbiosis Rekat Media.
- Helena Olii.(2007). Opini Publik. Jakarta, Penerbit Indeks.
- Iriantu, Een. (2017). Dampak Ketergantungan Media Sosial pada Kalangan Dystopian dan Utopian dalam Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi
- Lexy J.Moleong. (2002).Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Morissan. 2014. Teori Komunikasi Individu Hingga Massa. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nimmo, D. (2011). Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: Goodyear Publishing Co.
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE Pasal 3
- Ruslan, Rosady. (2010). Manajemen Public Relations & Media Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Walter Lippmann. (1998).Opini Umum. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.